

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

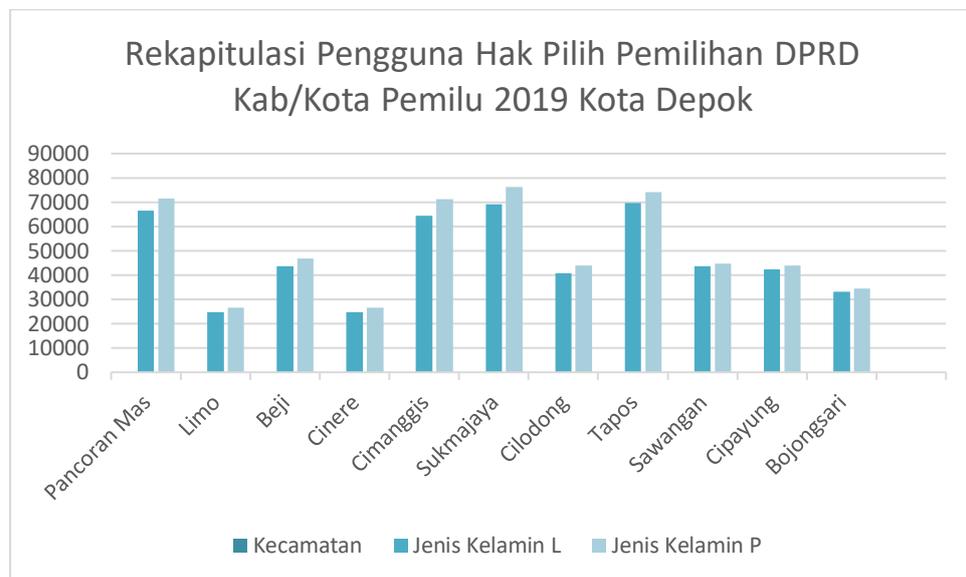
Penelitian ini akan membahas mengenai peranan politik kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan optimalisasi partisipasi politik perempuan melalui program pemberdayaan di wilayah konstituennya yaitu di Kota Depok pasca pemilu 2019. Alasan penelitian ini dilakukan adalah berangkat dari adanya partai politik yang berideologi Islam yang identik dengan nuansa maskulinitas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai sudut pandang partai politik yang berasaskan Islam terhadap peran partisipasi politik perempuan. Serta penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai bidang-bidang perempuan di dalam partai politik serta kontribusi kader perempuan di partai politik tersebut apakah terjadi perluasan *scope* politik ke arah masalah-masalah yang semula dianggap bukan isu politik seperti kesejahteraan anak, perlindungan reproduksi perempuan, pemberdayaan sesama kelompok perempuan dan sebagainya untuk memperluas basis konstituen dalam menjaring kader-kader perempuan baru pasca pemilu 2019 di Kota Depok.

Saat ini realitas partai politik di Indonesia hingga kini telah mengalami turbulensi akibat benturan peran para kadernya. Banyak kader yang terjerumus dalam kepentingan partai dibandingkan dengan mengemban tugasnya sebagai pembawa amanah rakyat. Tanggung jawab partai politik secara formal hingga saat ini sudah berjalan baik. Setidaknya partai politik mampu memberikan keleluasaan bagi kelompok perempuan untuk ikut aktif dalam partai politik. Eksistensi perempuan dalam politik makin dipertegas dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 07 tahun 2017 Pasal 173 ayat 2 huruf e yang mensyaratkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan juga dalam Pasal 245 yang mensyaratkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pengajuan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota. Mengingat proporsi penduduk perempuan di Indonesia tahun 2021 mencapai 49,42% atau setara dengan (135,24 juta jiwa), dan jumlah laki-laki di Indonesia mencapai 50,58% atau setara dengan (136,34 juta jiwa) (Badan Pusat Statistik,

2021). Dengan rata-rata usia produktif laki-laki sebanyak 68,73% dan perempuan sebanyak 68,52%. Dengan jumlah presentase tersebut, dapat dikatakan mereka bukanlah penduduk minoritas. Dengan adanya aturan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di partai politik setidaknya ada dua gejala yang dapat ditimbulkan dari eksistensi tersebut. Pertama, partai sebagai organisasi utuh yang bergerak dalam mengedepankan fungsi sosialnya di masyarakat terutama bagi kelompok perempuan. Kedua, tentu akan menimbulkan kesadaran bagi kader perempuan untuk tidak saja memilih tetapi dipilih. Atas dasar inilah maka keterlibatan perempuan sebagai kader partai dapat membuka peluang lebar dalam mengadvokasi kepentingan perempuan (Ardiansa, 2015).

Menurut Vitalaya (2011:156) Perempuan dalam pembangunan bangsa pada hakikatnya adalah upaya peningkatan kedudukan (status), peran, kemampuan, kemandirian, dan ketahanan mental, serta spiritual, perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sejalan dengan itu peran perempuan juga diarahkan pada upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas dan kemandirian serta kemajuan sumberdaya manusia, masyarakat dan bangsa Indonesia, serta mendorong dan meningkatkan peserta aktif dan swadaya seluruh masyarakat. Dalam hal ini kita bisa merujuk pada peranan kader partai politik sebagai aktor sekaligus ujung tombak demokrasi. Negara demokrasi tidak mungkin membiarkan para warga negaranya tidak berdaya, termasuk kelompok perempuan yang selama ini kurang diberdayakan dan dijadikan prioritas dalam pembangunan. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan dalam Siaran Pers “Seminar Langkah Strategis Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2024” tanggal 06 Desember 2022 bahwa dalam meningkatkan dan mendorong partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan perempuan dalam sektor politik dapat dilakukan oleh partai politik, partai politik memiliki andil dan peranan besar. Partisipasi kelompok perempuan merupakan langkah strategis dalam pembangunan, hal ini dibuktikan kelompok berjenis kelamin perempuan menyumbangkan suara terbanyak pada pemilu 2019, khususnya pemilihan legislatif tingkat DPRD Kabupaten/Kota di Kota Depok.

**Gambar 1.1. Rekapitulasi Pengguna Hak Pilih Pemilihan DPRD  
Kab/Kota Pemilu 2019 di Kota Depok**



(sumber: KPU Kota Depok)

Dengan demikian kaitannya dengan ini peranan kader partai politik dapat diartikan bahwa kader partai politik perlu membentuk strategi pendekatan yang bersifat kultural untuk menyentuh langsung kelompok perempuan. Pendekatan partai politik dalam melakukan fungsinya di masyarakat bukan hanya melakukan transaksi politik namun para kader parpol diharapkan mampu bergerak di dalam ruang pemberdayaan dan pembinaan sosial. Partai politik dapat memanfaatkan kader-kader kompetennya untuk terlibat langsung dalam tanggung jawab sosialnya, mengingat untuk mejadi seorang kader, para anggota kader telah melakukan kaderisasi. Kader-kader ini yang dapat menjadi aktor bagi parpol dalam tanggung jawab sosial di masyarakat. Usaha ini merupakan wujud dari perkembangan dan pembangunan kelompok perempuan kaitannya dengan perbaikan kualitas partai politik.

Selanjutnya, saat ini ditemukan fenomena mengenai partai politik yang mulai memperluas konstituen perempuannya, dengan menghadirkan organisasi sayap partai atau bidang perempuan yang terlibat langsung dalam kepemimpinan struktural internal partai politik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik. Diantaranya dijumpai beberapa partai politik yang terlibat aktif dalam pembuatan program-program yang menaungi dalam

pemberdayaan perempuan. Disadari atau tidak, keikutsertaan partai politik dalam menghadirkan kader perempuan untuk turun langsung dalam kepedulian sosial menjadi strategi baru bagi partai untuk memperluas konstituen perempuannya, tidak dapat dipungkiri juga hal ini akan menjadi penyadaran kelompok perempuan untuk berpartisipasi aktif di bidang politik

**Tabel 1.1**  
**Bidang Perempuan dan Organisasi Sayap Perempuan Partai Politik di Indonesia**

No	Partai	Bidang Perempuan	Organisasi Sayap Perempuan	Program
1.	 Partai Amanat Nasional (PAN)	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Puan Amanat	1) Pendidikan politik 2) Bantuan Kesehatan 3) Pemberdayaan UMKM
2.	 Partai Berkarya	-	Perempuan Partai Berkarya (PPB)	1) Womenpreneurship 2) Program pembangunan desa 3) Jum'at berkah 4) Pengembangan UMKM *program berbeda di setiap DPD
3.	 PDI PERJUANGAN	Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak	-	-

	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)			
4.	 Partai Demokrat	Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Srikandi Demokrat	1) Wadah kaderisasi
5.	 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan	Perempuan Indonesia Raya (PIRA)	1) Membantu perjuangan partai melalui pelaksanaan program-program partai di masyarakat
6.	 Partai Golongan Karya (Golkar)	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG)	1) Pembidaan kader dan pelaksanaan program partai sesuai dengan basis/ potensi kelompok strategisnya
7.	 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Perempuan Hanura	1) Menjangkau kelompok perempuan di pihak-pihak kelompok strategis di segala bidang

8.	 <p><b>PKS</b> Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</p>	Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK)	-	1) Pendidikan politik 2) Rumah Keluarga Indonesia 3) Pemberdayaan UMKM
9.	 <p><b>PKB</b> Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)</p>	*tidak dalam struktur	Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB)	1) Melaksanakan kebijakan partai yang berkaitan dengan kelompok masyarakat dan merupakan basis massa, kader partai sebagai penggerak di lapisan sosial masyarakat
10.	 <p><b>Partai NasDem</b> Partai Nasional Demokrat (NasDem)</p>	Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak	Garda Wanita Malahayati (Garnita Malahayati)	1) Melaksanakan kebijakan partai yang berkaitan dengan kelompok masyarakat dan merupakan basis massa, kader partai sebagai penggerak di lapisan sosial masyarakat tertentu

11.	 <b>PARTAI PERINDO</b> <small>PERSATUAN INDONESIA</small> Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	-	Kartini Perindo	-
12.	 <b>PPP</b> <small>MELAKUKAN PERSATUAN DENGAN PERKEMBANGAN</small> Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Bidang Pemberdayaa n Perempuan dan Anak	Wanita Persatuan Pembanguna n (WPP)	1) Mengembangkan kualitas kader perempuan terutama yang berstatus kader
13.	 <b>PSI</b> <b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b> Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Bidang Perempuan PSI	-	-
14.	 <b>PARTAI GARUDA</b> <small>GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA</small> Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	-	-	-

(sumber: Data diolah kembali oleh penulis)

Hadirnya bidang-bidang yang menaungi isu keperempuanan ini menjadi proses partisipasi sosial politik melalui program-program pemberdayaan sehingga menjadi fenomena menarik. Disisi lain, hadirnya bidang tersebut mencirikan keberadaan partai politik yang secara langsung membutuhkan legitimasi masyarakat untuk menduduki posisi di lembaga pemerintahan (baik eksekutif maupun legislatif), maka dari itu perlu diiringi dengan keikutsertaan parpol dalam

perannya di dalam pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok perempuan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh partai politik merupakan bagian dari etika politik sebagai wujud tanggung jawab sosial.

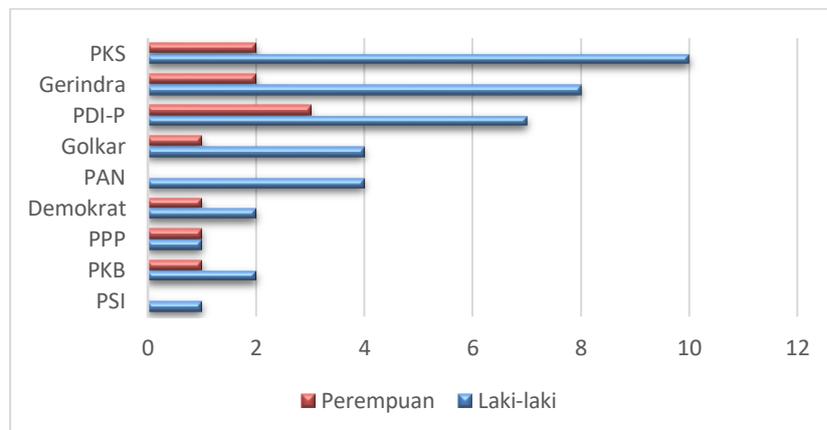
Salah satu partai yang berupaya untuk menciptakan strategi dengan gaya kultural, melalui dakwah dan memberikan pemberdayaan bagi kelompok perempuan di Kota Depok adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui program Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang dibawah oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK). Kerja BPKK PKS didukung oleh 4 pilar diantaranya: (1) Ketahanan keluarga, (2) Penguatan paradigma ketahanan keluarga, (3) Peningkatan kapasitas dan penokohan anggota perempuan PKS serta, (5) Optimalisasi kelembagaan perempuan. BPKK PKS memiliki keyakinan bahwa penguatan peran perempuan PKS harus dibangun atas dua dimensi peran, yaitu peran asasi sebagai istri atau ibu serta peran perluasan sebagai anggota masyarakat yang memiliki kewajiban menyuarkan kepentingan politik perempuan.

PKS sendiri memiliki ART yang mendukung dalam gerakan pemberdayaan yang tercantum di dalam pasal 4 poin D tentang institusi yang menyatakan “mengoptimalkan institusi di lingkungan partai untuk kepentingan konstituen melalui pendidikan dan pelatihan politik, serta klub diskusi, olahraga, kesenian dan kebudayaan; mengoptimalkan institusi lain untuk memberdayakan anggota partai dalam beberapa kegiatan, antara lain perbaikan antarindividu dan keluarga, pemberantasan penyakit-penyakit sosial, bimbingan dan penyuluhan pemuda ke jalan yang lurus, pelestarian lingkungan, serta penanggulangan bencana”. Dengan jelas bahwa Partai Keadilan Sejahtera memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam tanggung jawab sosialnya sekaligus etika berpolitik dengan mencirikan kepedulian sosial. Dalam platform tersebut diketahui bahwa PKS memiliki cita-cita dalam pembangunan khususnya perempuan melalui keluarga. Hal ini menguatkan bahwa secara sosial pun PKS memiliki tanggung jawab untuk terlibat langsung dalam usaha pemberdayaan dan pembinaan sosial, yang mana selanjutnya menjadi pola kerja PKS dalam melakukan usaha-usaha pemberdayaan perempuan. kaitan ini tidak hanya pada terlaksananya aksi sosial

namun juga dapat dipahami sebagai keterlibatan dalam proses peran kader parpol di dalam pemberdayaan perempuan.

Menelaah lebih jauh adanya peran kader parpol PKS Kota Depok dalam pemberdayaan kelompok perempuan juga diperlihatkan dengan konsistensi di dalam program-program Rumah Keluarga Indonesia. Program pemberdayaan bagi perempuan ini tidak hanya sebatas program kepentingan jangka pendek. Tetapi kader terlibat aktif di setiap periode yang bisa juga dijadikan salah satu indikasi bahwa partai tersebut memang secara konsisten melakukan upaya pemberdayaan perempuan, salah satunya di kota Depok. Di tahun 2022 Partai Keadilan Sejahtera mengadakan pelaksanaan kegiatan PKS Menyapa yang bertujuan mendekatkan warga dengan PKS melalui kegiatan-kegiatan yang simpatik dan membantu masyarakat. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan logo baru Partai agar masyarakat mudah mengenal dan menerima kehadiran PKS sebagai partai yang simpatik. Partai Keadilan Sejahtera membawa konsistensi program ini menjadi buah manis bagi partai untuk mendapatkan suara di konsituennya. PKS membawa kemenangan untuk memenangkan kontesasi Pilkada 2020. Secara berurut, PKS juga membawa kursi terbanyak di DPRD Kota Depok meskipun keterwakilan perempuan di legislatif di dominasi oleh Fraksi PDI-P periode 2019-2024, namun PKS DPD Depok memiliki program-program produktif dalam pemberdayaan perempuan.

**Gambar 1.2. Komposisi Kursi DPRD Kota Depok  
Periode 2019-2024**



(Sumber: DPRD Kota Depok)

Terdapat peran serta kader perempuan dominan di dalam Fraksi PKS, dua diantaranya memegang jabatan diantaranya Teuku Farida Rachmayanti sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran dan Sri Utami sebagai Ketua Fraksi PKS di DPRD Kota Depok. Hal ini menegaskan bahwa program-program yang dilakukan oleh PKS mampu menjadi strategi kepartaian juga, karena sejatinya tokoh dengan jabatan strategis disegani dimasyarakat dan dipercayai. PKS mampu merangkul semua elemen masyarakat di Kota Depok termasuk kaum perempuan. Keaktifan pada kader perempuan yang telah mendapatkan kursi perwakilan di DPRD juga kerap mendorong program-program pemberdayaan perempuan. Seperti yang dilakukan oleh Teuku Farida Rachmayanti, melalui instagramnya kerap mengunggah kegiatan diskusi bersama para pemuda Kota Depok yang tergabung di dalam PKS Muda ([pksdepok.id](http://pksdepok.id), 2022). Kemudian DPD PKS Depok kerap mengadakan seminar-seminar untuk para Ibu Rumah Tangga dalam menguatkan peran keluarga di masa pandemi. Serta program-program pemberdayaan lainnya seperti salah satu program sekolah tani yang merupakan program nasional PKS, kegiatan ini diagendakan dan berkejasama dengan BTN Depok ([Pksdepok.id](http://Pksdepok.id), 2022)

Dari permasalahan yang dibahas pada pernyataan di atas, maka penting untuk menganalisis lebih lanjut mengenai peran kader perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera dalam rangka pemberdayaan perempuan, sebab keterwakilan perempuan di dalam kepengurusan partai politik menjadi salah satu aspek pendorong dalam melakukan pemberdayaan kelompok perempuan. Sehingga perlu untuk melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi dorongan bagi pemberdayaan perempuan melalui partai politik. Pada penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji dengan menggunakan pendekatan Peran Perempuan di dalam Politik khususnya di dalam internal partai politik sebagai kader partai politik. Saat ini PKS di Kota Depok sendiri telah mendeklarasikan bahwa akan meningkatkan suara di konstituennya dengan menghadirkan para kader partai di berbagai DPC, kader-kader partai diberikan amanah dan tanggung jawab untuk melakukan pendekatan dengan konstituennya menuju pemilu 2014. PKS sendiri memiliki cita-cita akan meningkatkan suara dua kali lipat dari pemilu sebelumnya. Disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Depok Hermanto Setiawan bahwa

PKS Depok berhasil menyumbang 180. 219 suara pada pilpres 2019. PKS Depok sendiri akan melakukan peningkatan hingga 390 ribu suara.

Berdasarkan penjelasan diatas adanya BPKK sebagai bidang perempuan di dalam Partai Keadilan Sejahtera ini menjadi fenomena politik yang cukup menarik. Organisasi partai politik juga memiliki peran dan andil besar untuk mendorong para kadernya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dan memberdayakan perempuan dari semua sendi kehidupan tanpa terkecuali. Kader perempuan yang terlibat aktif dalam partai memiliki peran sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak bagi terlaksananya program pemberdayaan perempuan. Hal menarik lainnya adalah PKS yang merupakan partai politik dengan identitas Islam tidak memberikan batasan khusus untuk perempuan, justru partai ini memberikan kesempatan bagi para kader perempuannya untuk berperan ganda yaitu sebagai istri dan juga sebagai kader partai untuk menyuarakan kepentingan politik perempuan. Namun peranan kader perempuan masih terbentur oleh beberapa kepentingan politik partai. Menurut Wardhani dalam (Ramdhani, 2021) ada tiga posisi kepentingan yang akan dihadapkan oleh kader perempuan dalam partai politik: 1) Kepentingan pribadi. Sebagai politisi perempuan memiliki kepentingan untuk merebut posisi-posisi strategis parpol, seperti menjadi pengurus, caleg, anggota parlemen, kepala daerah, dan para petinggi elite politik lainnya. 2) Kepentingan parpol. Sebagai bagian dari partai, perempuan memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi memenangkan partainya dalam pemilu karena perolehan suara partai yang banyak akan berpengaruh pada pemenuhan kepentingan pribadi sebagai politisi. 3) Kepentingan perempuan. Sebagai perempuan yang berpolitik maka seorang perempuan memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kepentingan perempuan melalui jalur politik. Untuk itu kiprah perempuan dalam parpol bukan sekadar menjadi ‘milik privat’ tetapi menjadi representasi dari paradigma pentingnya perempuan yang ada dalam proses politik. Maka perempuan dalam parpol kerap berada pada kondisi kontradiksi yang cukup rumit yaitu kepentingan parpol versus kepentingan perempuan (Wardhani, 2007). Selain itu, partai politik kurang mengedepankan perempuan sebagai kader aktif dan peluangnya di dalam pembangunan. Keterlibatan perempuan di dalam partai politik hanya sekadar menjadi “pemanis” atau “pelengkap”. Kader perempuan dihadirkan

ketika akan menjelang pemilu saja untuk memenuhi persyaratan kuota 30%. Jadi, yang dilakukan antar partai dan kader perempuan sifatnya hanya transaksional politik. Namun melalui perspektif humanis yang didasari pada tanggung jawab sosial, partai politik hendaknya mengedepankan keberadaan dan fungsi sosialnya di dalam masyarakat. Nilai humanis ini yang selanjutnya terapkan bagi kelompok perempuan dengan memberikan peran humanis bagi kader perempuannya melalui pendekatan kultural yang diberikan partai politik.

Selain itu juga terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik penelitian peneliti, yaitu peran partai politik, pemberdayaan perempuan. **Pertama, Artikel Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Vol. 4, No. 2, Penulis Widdy Yuspita Widiyaningrum berjudul Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik (2020)** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori partisipasi politik. Penelitian ini menemukan fakta bahwa masih minimnya peran perempuan di dalam partai politik ditentukan oleh kebijakan partai itu sendiri. Perempuan dapat berperan aktif jika partai melakukan pendekatan secara internal/ personal, partai mengedepankan cara-cara persuasif yang mampu menarik hati simpati kader perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pergerakan politik hal ini ditujukan agar kader perempuan sadar akan peranannya sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab politik. Pada sisi politik Widdy Yuspita Widiyaningrum mengemukakan partisipasi politik kader perempuan dalam partai tidak perlu didefinisikan secara kaku layaknya ambisi untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, pemilu, pilkada, dsb, bentuk partisipasi seorang kader perempuan dalam partai politik memiliki konteks yang lebih luas yakni ikut menginisiasi, terlibat aktif, ikut dalam penentuan kebijakan, ikut serta menyukseskan dalam program partai, atau seminim-minimnya mampu menjalankan fungsi partai politik dengan memberikan pencerahan dan sosialisasi politik kepada masyarakat (Widiyaningrum, 2020). Relevansi penelitian Widiyaningrum (2020) dengan penelitian ini adalah persamaan yang diteliti mengenai peran kader perempuan di dalam partai politik, namun penjelasan Widiyaningrum hanya bersifat normatif tanpa ada penelitian lebih dalam. Berbeda dengan penelitian ini, peneliti menjadikan kader perempuan di Partai Keadilan Sejahtera sebagai objek penelitian.

**Kedua, Artikel *Journal of Politic and Government Studies* Vol. 6, No.4, penulis Eri Haryati berjudul *Partisipasi Politik Perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Jepara*** Pada penelitian ini membahas mengenai partisipasi politik perempuan dalam PKS di Kabupaten Jepara. Haryati menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teori partisipasi politik. Pada posisi politik, tulisannya Haryati menjelaskan partisipasi politik perempuan di PKS Kabupaten Jepara mencakup 5 hal penting diantaranya, kontribusi perempuan, pemberdayaan perempuan, pengorganisasian perempuan, keterwakilan perempuan serta peran perempuan dalam mempengaruhi kebijakan. Keterlibatan perempuan di PKS dapat dilihat dari jumlah kader yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan PKS kepada masyarakat. Peran perempuan PKS di Kabupaten Jepara dilakukan saat tahap kaderisasi personal dengan syarat kader PKS akan mendatangi orang-orang yang ingin dia kader lalu memberikan pemahaman mengenai materi-materi yang berguna untuk memperbaiki kualitas dirinya. Peran dilaksanakan dengan 3 dimensi pengabdian yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan (Haryati et al., 2017). Relevansi penelitian Haryati (2020) dengan penelitian ini adalah persamaan yang diteliti mengenai pemberdayaan yang dilakukan oleh partai politik terhadap perempuan, namun penjelasan Haryati menekankan masih kurangnya partisipasi kader perempuan di internal partai. Hal ini disebabkan oleh hambatan bagi para kader perempuan untuk bersaing dengan kader laki-laki, kader perempuan PKS masih memprioritaskan tugas di rumah dan tugas profesi, sehingga peranan di partai politik masih belum signifikan, sehingga kader perempuan di PKS Kabupaten Jepara lebih memilih untuk menjadi sekadar pendukung partai. Berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian ini difokuskan untuk melihat peran Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan kegiatan partai di lingkungan sosial masyarakatnya (wilayah konstituen) secara langsung.

**Ketiga, Skripsi Muhammad Ubaidillah berjudul *Strategi Partai Politik Dalam Pemberdayaan Masyarakat, Antara Tanggung Jawab Sosial dan Pragmatisme Politik (Studi Partai Keadilan Sejahtera DPD Sleman, Yogyakarta)*, jurusan Ilmu Sosiatri, Universitas Gadjah Mada, tahun 2011** Pada skripsi ini, penelitian menggunakan pendekatan strategi politik dan pemberdayaan masyarakat. Ubaidillah (2011) menemukan pemberdayaan

masyarakat di Sleman oleh PKS dilakukan oleh kader PKS Sleman dan pemberdayaan yang dilakukan oleh organisasi sayap parpol. Kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan metode dakwah oleh para kader sebagai bentuk manifestasi kepercayaan kader. Relevansi penelitian Ubaidillah (2011) dengan penelitian ini adalah persamaan yang diteliti mengenai peranan partai, khususnya Partai Keadilan Sejahtera dalam tanggung jawab sosialnya melakukan pemberdayaan masyarakat, penelitian ini membantu saya dalam menganalisis tanggung jawab sosial partai politik khususnya Partai Keadilan Sejahtera. Namun penjelasan Ubaidillah lebih menekankan pada peranan partai untuk masyarakat umum. Berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian ini difokuskan untuk melihat peran kader perempuan di Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan program pemberdayaan bagi kelompok perempuan.

***Keempat, Skripsi Robi Firdaus berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Partai Politik : Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Jurusan Sosiologi, FISIP, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2021**** Dalam skripsi ini menghasilkan data bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh PKS di Desa Margahayu selatan ialah program pemberdayaan yang berfokus pada kegiatan ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan sosial. Kegiatan dilakukan dengan metode kajian keagamaan Islam yang memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai budi pekerti dan akhlakul karimah. Strategi yang dilakukan ialah dengan musyawarah, pertimbangan, dan koordinasi. Dengan tahapan pertama, melakukan sosialisasi langsung di masyarakat. Kedua, pengoptimalan program dengan mengikutsertakan masyarakat. Ketiga, terjun langsung ke masyarakat. Keempat, menghadirkan kader kompeten dari internal partai, namun tidak membawa identitas PKS. Kelima, mengajak para pemuda dan tokoh masyarakat. Kegiatan pemberdayaan di Desa Margahayu dilakukan dengan menjalin hubungan dengan tokoh masyarakat. Namun kegiatan pemberdayaan diiringi dengan kampanye politik. Pada penelitian ini terdapat teori pemberdayaan masyarakat yang dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu, data yang disajikan dalam penelitian ini dapat menjadi gambaran peneliti dalam melakukan pengolahan data penelitian mengenai strategi PKS dalam melakukan pemberdayaan. Namun objek dalam penelitian ini

yaitu masyarakat di Desa Margahayu Selatan, sementara peneliti melakukan penelitian di lingkup Kota Depok sehingga menjadi pembeda dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

**Kelima, Penelitian Emezat H. Mengesha berjudul *Women's Representation in Ethiopia's Political Parties (Issues of Inclusion and Diversity)*, Institute For Security Studies (ISS), 2022** Pada penelitian ini menjelaskan peran keterwakilan perempuan di dalam partai politik, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan partisipasi perempuan dan partai politik. Mengesha (2022) menjelaskan bahwa partisipasi perempuan di partai politik yang ada di Ethiopia sangat beragam. Perempuan yang beraneka ragam dari suku, daerah, agama, status golongan menyebabkan adanya identitas perempuan sangat banyak dalam merepresentasikan kelompoknya. Namun hadirnya perempuan di partai-partai ini terhalang oleh budaya patriarki yang sudah mengakar di sistem politik Ethiopia, sehingga perempuan yang terlibat di dalam partai politik sulit untuk mencapai peran substantif dan representasinya di dalam politik, dalam artian melakukan program-program yang sifatnya sebagai tanggung jawab sosial. Namun karena keragaman tadi dan orientasi setiap perempuan yang masuk ke dalam partai ini berbeda. Mengesha (2022) menemukan fakta bahwa faktor-faktor yang menghambat ini terdapat beberapa perempuan yang berperan dan berdaya dalam melakukan peran substantif nya, mereka kerap melakukan berbagai agenda perubahan. Faktor yang menghambat biasanya dikarenakan pendidikan dan identitas yang terpinggirkan sehingga mereka kurang mendapatkan power di dalam partai nya misal terkait kepemimpinan. Mengesha (2022) juga menyatakan pentingnya perempuan untuk terlibat aktif di partai politik adalah untuk mendorong sesama perempuan agar menjadi *role* 'wanita seperti mereka' bisa terlibat dalam program-program pembangunan. Dalam penelitiannya Mengesha (2022) menyarankan perlu adanya peninjauan kembali mengenai peraturan dan program partai politik dalam rangka memandu AD/ART Partai dan peninjauan kembali terkait peranan perempuan itu sendiri di dalam partai, perlunya kejasama LSM untuk membantu mengadvokasi perempuan dalam kepemimpinan di partai (Mengesha, 2022). Relevansi dengan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan peran perempuan di dalam partai juga masih mendapatkan beberapa

hambatan, hal ini bisa menjadi referensi bagi peneliti untuk melihat hambatan apa saja bagi kader perempuan dalam melakukan peran nya sebagai anggota partai politik.

*Keenam, Artikel Politics & Gender Journal Vol.12, penulis Kimberly Cowell-Meyers berjudul Women's Political Parties in Europe (2016), American University* Penelitian ini menemukan fakta bahwa di era saat ini mulai banyak kehadiran partai politik perempuan termasuk di negara-negara Eropa. Terdapat kurang lebih 30 partai perempuan di beberapa negara Eropa. Meskipun berumur pendek tetapi dampaknya sangat terukur. Partai perempuan ini memiliki peranan dan komitmen yang sama dalam meningkatkan representasi perempuan secara substantif maupun deskriptif. Partai perempuan muncul sebagai bentuk strategi gerakan perempuan di bawah politik elektoral, kemunculan ini diakibatkan rasa frustrasi perempuan dibawah partai-partai yang mapan namun masih mengabaikan kepentingan perempuan. Selain itu penelitian ini menunjukkan ketika perempuan diberdayakan secara profesional, melalui pekerjaan maupun strategi politiknya maka 90% akan membawa pengakuan penting bagi perempuan. Namun, hadirnya partai perempuan juga belum tentu membawa keberhasilan, perlu ditekankan sejauh mana perbedaan partai ini dalam memberdayakan perempuan, mengikutsertakan perempuan di berbagai tingkatan. Meskipun peneliti menunjukkan kegagalannya partai perempuan dalam menghadirkan wajah baru di sistem kepartaian politik. Tetapi perlu dipertimbangkan jika perempuan tetap tergabung dalam partai politik pada umumnya, dengan membentuk program-program yang bermanfaat dengan mengandalkan anggota perempuannya dalam melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi dan sebagainya (Cowell-Meyers, 2016). Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok perempuan yang telah membentuk partai sendiri belum tentu berhasil akibat struktur patriarki yang menyebabkan kepentingan perempuan dikesampingkan. Cowell-Meyers (2016) menyarankan agar perempuan bisa saling memberdayakan perempuan dengan melakukan pemberdayaan di bidang lainnya. Sehingga ini bisa menjadi referensi bagi peneliti dan objek yang akan diteliti oleh peneliti dalam mengembangkan sistem kepartaian yang mengembangkan isu pemberdayaan perempuan. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Peran Kader Perempuan Partai Keadilan Sejahtera

dalam Optimalisasi Partisipasi Politik Perempuan Melalui program Pemberdayaan di Kota Depok Pasca Pemilu 2019, yang menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah kehadiran perempuan di partai politik kurang di optimalkan untuk melakukan pendekatan dengan konstituen, kader partai politik khususnya kader perempuan hanya dijadikan sebagai pemanis saat menjelang pemilu saja untuk pemenuhan kuota 30%.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan dari fakta-fakta dan penjelasan di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana peran Kader Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Kader Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam melakukan proses optimalisasi partisipasi politik perempuan melalui program pemberdayaan di Kota Depok pasca pemilu 2019?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis terkait bagaimana peran kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera dalam optimalisasi partisipasi politik perempuan di Kota Depok melalui program pemberdayaan, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi para kader perempuan PKS dalam melakukan program pemberdayaan perempuan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Selain itu, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain:

- a. **Manfaat praktis**, penelitian ini menjadi salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan tugas akademik yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, serta sebagai salah satu usaha bagi peneliti untuk mendalami dan meningkatkan ilmu pengetahuan terkait ilmu politik.
- b. **Manfaat akademis**, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bentuk kontribusi bagi UPN Veteran Jakarta dalam pengembangan

keilmuan di bidang politik khususnya dalam memperluas partisipasi politik dan pemberdayaan kelompok perempuan di Indonesia.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Agar penelitian tersusun secara sistematis, maka dalam melakukan penelitian ini peneliti membagi sistematika penulisan menjadi 5 (lima) bab yang terbagi menjadi beberapa sub bab di dalamnya. Sistematika dalam penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi:

BAB I, dalam bab ini berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, penelitian relevan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. Bab ini akan menjadi acuan kerangka penelitian untuk bab selanjutnya.

BAB II, dalam bab ini berisi konsep dan teori yang menjadi landasan dalam penulisan analisis penelitian ini serta alur pemikiran yang menjelaskan secara singkat dari keseluruhan tentang apa yang akan diteliti pada penelitian ini.

BAB III, dalam bab ini berisi metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yang meliputi objek penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi dan waktu dilakukannya penelitian, narasumber yang akan menjadi sumber informasi dan data primer untuk penelitian ini, instrumen pengumpulan data, serta pengumpulan data.

BAB IV, dalam bab ini berisi data dan analisis penelitian yang akan menjawab terkait peran kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera dalam melakukan pemberdayaan perempuan di Kota Depok.

BAB V, dalam bab ini berisi penutup dalam bentuk kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikaji serta apabila diperlukan